

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI TANGGUNG JAWAB SOSIAL, SUMBER DAYA ALAM, LINGKUNGAN DAN CAGAR BUDAYA SERTA PERTAMBANGAN

A. Perihal Tanggung Jawab Sosial

1. Sejarah dan Perkembangan *Corporate Social Responsibility*.

Konsep awal tanggung jawab sosial (*social responsibility*) dari suatu perusahaan secara eksplisit baru dipaparkan oleh Howard R. Bowen melalui karyanya yang diberi judul “*Social Responsibilities of Bussinessman*“.¹⁾ Ada dua hal yang kiranya perlu diperhatikan mengenai CSR pada masa ini. Pertama, pada saat Bowen menulis buku ini dunia bisnis belum mengenal bentuk perusahaan korporasi sebagaimana yang kita ketahui pada saat ini. Kedua, judul buku Bowen saat itu menyiratkan bias gender, karena pada saat itu pelaku bisnis di Amerika masih didominasi oleh kaum pria. Bowen memberikan rumusan tanggung jawab sosial, sebagai berikut :

*“it refers to the obligations of businessman to pursue those policies, to make those decisions, or to follow those lines of action which are desirable in terms of the objectives and values of our society”*²⁾

Definisi yang diberikan oleh Bowen ini telah memberi landasan awal bagi pengenalan kewajiban pelaku bisnis untuk menetapkan tujuan bisnis yang selaras dengan tujuan dan nilai-nilai masyarakat. Selanjutnya pada

¹⁾ Csrrjatim.org/2/data/sejarah-csr.pdf diakses tanggal 26 Agustus 2016.

²⁾ *Ibid.*

Tahun 1960, Keith Davis menambahkan dimensi lain dari tanggung jawab sosial perusahaan ini. Ia merumuskan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai, *“businessman’s decisions and actions taken for reasons at least partially beyond the firm’s direct economic or technical interest”*.³⁾ Melalui rumusan tersebut, Davis menegaskan adanya tanggung jawab sosial perusahaan di luar tanggung jawab ekonomi semata-mata. Argumen Davis menjadi sangat relevan karena pada saat itu, pandangan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan masih sangat didominasi oleh pemikiran para ekonom klasik.

Pada saat itu, konsep ini telah mengakibatkan sebagian orang yang terlibat dalam aktivitas bisnis maupun para teoritis ekonomi klasik menarik kesimpulan bahwa satu-satunya tujuan perusahaan adalah meraih laba semaksimal mungkin, serta menjalankan operasi perusahaan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Setelah itu, Davis memperkuat argumennya dengan menegaskan adanya *“Iron Law of Responsibility”*. Berkaitan dengan hal ini, Davis menyatakan : *“social responsibility of businessman need to be commensurate with their social power then the avoidance of social responsibility leads to gradual erosion of social power”*.⁴⁾

Argumen yang dibangun oleh Davis menjadi cikal bakal bagi identifikasi kewajiban perusahaan yang akan mendorong munculnya konsep CSR di tahun 1970-an. Selain itu, konsep Davis mengenai *“Iron*

³⁾*Ibid.*

⁴⁾*History of Corporate Social Responsibility and Sustainability*, <http://www.brass.cf.ac.uk/uploads/History L3.pdf>, diakses tanggal 26 Agustus 2016.

Law of Responsibility“ menjadi acuan bagi pentingnya reputasi dan legitimasi publik atas keberadaan suatu perusahaan. Awal tahun 1970-an menjadi babak penting perkembangan konsep CSR ketika para pimpinan perusahaan terkemuka di Amerika serta para peneliti yang diakui dalam bidangnya membentuk *Committee for Economic Development* (CED). Salah satu pernyataan CED pada tahun 1971 yang dituangkan dalam laporan berjudul “*Social Responsibilities of Business Corporation*“

Selanjutnya CED membagi tanggung jawab sosial perusahaan kedalam tiga lingkaran tanggung jawab, yakni :⁵⁾

- a. Lingkaran tanggung jawab terdalam (*inner circles responsibilities*) mencakup tanggung jawab perusahaan untuk melaksanakan fungsi ekonomi yang berkaitan dengan produksi barang dan pelaksanaan pekerjaan secara efisien serta pertumbuhan ekonomi.
- b. Lingkaran tanggung jawab pertengahan (*intermediate circle of responsibilities*) menunjukkan tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi ekonomi sementara pada saat yang sama memiliki kepekaan kesadaran terhadap perubahan nilai-nilai dan prioritas-prioritas sosial seperti meningkatnya perhatian terhadap konservasi lingkungan hidup, hubungan dengan karyawan, meningkatnya ekspektasi konsumen untuk memperoleh informasi produk yang jelas, serta perlakuan yang adil terhadap karyawan di tempat kerja.

⁵⁾*Ibid.*

- c. Lingkaran tanggung jawab terluar (*outer circle of responsibilities*) mencakup kewajiban perusahaan untuk lebih aktif dalam meningkatkan kualitas lingkungan sosial. Pada permulaan awal tahun 1970-an, beberapa ahli seperti Frederick (1978) dan Sethi (1979) mengajukan kritik terhadap konsep CSR.

Mereka memandang konsep CSR tidak memberikan arahan yang cukup mengenai apa yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam menanggapi suatu masalah atau tekanan dari masyarakat. Konsep CSR hanya menjelaskan kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan terhadap masyarakat. Sebagai pengganti konsep CSR, Frederick dan Sethi menawarkan konsep *corporate social responsiveness*. Menurut Frederick, yang dimaksud dengan *corporate social responsiveness* adalah “*the capacity of a corporation to respond social pressure.*”

Selain isu mengenai kapasitas perusahaan dalam memberikan respon terhadap tekanan-tekanan sosial yang akan tercermin dari citra perusahaan di mata publik, perkembangan CSR pada tahun 1970-an sampai 1980-an juga mencatat adanya kebutuhan baru dari perusahaan-perusahaan yang melaksanakan aktivitas CSR agar aktivitas CSR yang mereka lakukan terukur.

Hal ini sangatlah mudah dipahami mengingat biaya yang digunakan untuk melaksanakan aktivitas CSR merupakan dana yang berasal dari para pemegang saham yang harus dipertanggungjawabkan oleh manajer perusahaan, oleh karenanya, para peneliti seperti Carroll, Wartick dan

Cochran, serta Wood mengembangkan konsep yang disebut dengan *corporate social performance* (CSP), dinyatakan :

“ Mengandung tiga dimensi yaitu dimensi kategori tanggung jawab sosial (ekonomi, etika, hukum dan *discretionary*), dimensi kemampuan memberikan respon (*responsiveness*), serta dimensi dalam isu sosial tempat perusahaan terlibat (lingkungan, diskriminasi pekerja, keamanan produk, serta keselamatan pekerja dan pemegang saham)”.⁶⁾

Di penghujung tahun 1980-an tepatnya pada tahun 1987, *The World Commission on Environment and Development* yang lebih dikenal dengan *The Brundtland Commission* mengeluarkan laporan yang dipublikasikan oleh *Oxford University Press* berjudul “*Our Common Future*“. Salah satu poin penting dalam laporan tersebut adalah diperkenalkannya konsep pembangunan berkelanjutan yang didefinisikan *The Brundtland Commission* sebagai berikut : “*sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*“.⁷⁾

Konsep *sustainability development* sendiri mengandung dua ide utama di dalamnya, yakni untuk melindungi lingkungan dibutuhkan pembangunan ekonomi, oleh karena itu, perlindungan terhadap lingkungan hidup membutuhkan standar hidup yang memadai untuk seluruh masyarakat dunia dan yang kedua adalah pembangunan ekonomi harus memperhatikan keberlanjutan, yakni dengan cara melindungi sumber daya yang dimiliki bumi bagi generasi mendatang. Pertumbuhan ekonomi tidak

⁶⁾ *Ibid.*

⁷⁾ Sutan Remy Sjahdeni, “*Corporate Responsibility*”, Jurnal Hukum Bisnis, 9 Vol. 26, No. 3 Tahun 2007, hlm. 60.

bisa dibenarkan dengan merusak hutan, lahan pertanian, air, dan udara di mana semua sumber daya tersebut sangat dibutuhkan untuk mendukung kehidupan manusia di bumi.

The Bruntland Commission dibentuk untuk menanggapi keprihatinan yang semakin meningkat dari para pemimpin dunia terutama menyangkut peningkatan kerusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang semakin cepat. Selain itu, komisi ini juga dibentuk untuk mencermati dampak kerusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam terhadap ekonomi dan pembangunan sosial, oleh karena, konsep ini dibangun dengan tiga pilar yang berhubungan dan saling mendukung satu sama lain yakni sosial, ekonomi dan lingkungan. Sebagai adopsi atas konsep *sustainable development*, saat ini perusahaan secara sukarela menyusun laporan setiap tahun yang dikenal dengan *sustainability report* atau juga dikenal dengan nama *corporate citizenship report*.⁸⁾

Laporan tersebut menguraikan dampak organisasi perusahaan terhadap tiga aspek, yakni dampak operasi perusahaan terhadap ekonomi, sosial dan lingkungan. Satu terobosan besar perkembangan tanggung jawab sosial perusahaan dikemukakan oleh John Elkington yang terkenal

⁸⁾ J.J. Asongu, "The History of Corporate Social Responsibility", Journal of Business and Public Policy, (Vol. 1 Number 2, Spring 2007), hlm.8. Mengutip Wallace B. Donham dalam pidatonya yang disampaikan di *Nort Western University*, "Business started long centuries before the dawn of history, but business as we now know it is new-new in its broadness of scope, new in its social significance. Business has not learned how to handle these changes, nor does it recognize the magnitude of its responsibility for the future of civilization."

dengan “*The TripleBottom Line*“ yang dimuat dalam buku “*Cannibals with Forks, the TripleBottom Line of Tweintieth Century Business*“⁹⁾

Konsep tersebut mengakui bahwa jika perusahaan ingin usahanya tetap berjalan maka perlu memperhatikan 3P, yaitu bukan cuma *profit* yang diburu namun juga harus memberikan kontribusi positif pada masyarakat (*people*) dan ikut aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*). Konsep *Triple Bottom Line* tersebut merupakan kelanjutan dari konsep *sustainable development* yang secara eksplisit telah mengaitkan antara dimensi tujuan dan tanggung jawab, baik kepada *shareholder* maupun *stakeholder*.

Di Indonesia, istilah CSR semakin populer digunakan sejak tahun 1990-an. Beberapa perusahaan sebenarnya telah lama melakukan CSA (*Corporate Social Activity*) atau aktivitas sosial perusahaan. Walaupun tidak menamainya sebagai CSR, secara faktual aksinya mendekati konsep CSR yang merepresentasikan bentuk “peran serta” dan “kepedulian” perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan. Melalui konsep investasi sosial perusahaan *seat belt*, sejak tahun 2003 Departemen Sosial tercatat sebagai lembaga pemerintah yang aktif dalam mengembangkan konsep CSR dan melakukan advokasi kepada berbagai perusahaan nasional. Kepedulian sosial perusahaan terutama didasari alasan bahwasannya kegiatan perusahaan membawa dampak (baik maupun buruk) bagi kondisi

⁹⁾*Laissez faire* adalah bahasa Prancis yang berarti “biar saja berjalan sendiri”. Pada masa ini tugas pokok Negara dilukiskan sebagai Negara penjaga malam (*nightwatchstate*) atau hanya sebagai penjaga keamanan warga negaranya. Sedangkan terhadap segala kegiatan ekonomi diatur oleh *invisiblehands* atau pasar yang akan menciptakan keseimbangan antara permintaan dan penawaran secara kompetitif.

lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat, khususnya di sekitar perusahaan beroperasi.

2. *Coorporate Social Responsibility* dalam Pengaturan di Indonesia.

Corporate Social Responsibility diatur dalam Pasal 15 huruf b Undang–Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan : ”setiap penanam modal harus melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.”¹⁰⁾ Penjelasan Pasal 15 huruf b Undang-Undang Penanaman Modal menyatakan : bahwa yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah : “tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.”

Pasal 1 butir (3) Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan :

“tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya”.

Pada Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan bahwa : “perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”. “tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana

¹⁰⁾ Sofyan Djalil, *Konteks Konteks Teoritis dan Praktis Corporata Social Responsibility*, Jurnal Reformasi Ekonomi Vol.4 No.1 Januari-Desember 2003, hlm.4.

dimaksud pada ayat satu merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran”. John Elkingston’s, menegaskan bahwa :

*“Corporate Social Responsibility is a concept that organisation especially (but not only) corporations, have an obligation to consider the interests of costumers, employees, shareholders, communities, and ecological considerations in all aspectr of their operations. This obligation is been to extend beyond their statutory obligation to comply with legislation”.*¹¹⁾

Suhandari M. Putri, menyatakan : *Corporate Social Responsibility* adalah “komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan”. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya.

Berdasarkan ISO 26000, *Guidance Standard on Social Responsibility* pada Januari 2006, tanggung jawab sosial diartikan sebagai tanggung jawab suatu organisasi atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya

¹¹⁾ *Ibid.*

terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis, yang:¹²⁾

- a. Konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat;
- b. Memperhatikan kepentingan dari para stakeholder;
- c. Sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma internasional;
- d. Terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi dalam pengertian ini meliputi baik kegiatan, produk maupun jasa.

Adapun pengaturan *Corporate Social Responsibility* ini dapat kita lihat di :

1. Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

B. Perihal Sumber Daya Alam

1. Pengertian dan Penggolongan Sumber Daya Alam

Sumber daya alam ialah sumber daya yang terbentuk karena kekuatan alamiah, misalnya tanah, air dan perairan, biota, udara dan ruang, mineral, bentang alam (*landscape*), panas, bumi dan gas bumi, angin, pasang

¹²⁾*Ibid.*

surut/arus laut.¹³⁾ Secara ilmiah dapat dikatakan bahwa sumber daya alam adalah semua unsur tata lingkungan biofisik yang dengan nyata atau potensial dapat memenuhi kebutuhan manusia.¹⁴⁾

“Sumber daya alam digolongkan berdasarkan potensi penggunaannya, misalnya Sumber Alam Penghasil Energi; air, matahari, arus laut, gas bumi, minyak bumi, batu bara, angin dan biotis/tumbuhan. Sumber Alam Penghasil Bahan Baku yang terdiri atas mineral, gas bumi, biotis, perairan, tanah dan sebagainya. Sumber Alam Lingkungan Hidup terdiri atas udara dan ruang, perairan, landscape, dan sebagainya.”¹⁵⁾

Berdasarkan kemampuannya untuk memperbaharui diri sesudah mengalami suatu gangguan, maka sumber alam dibagi ke dalam 2 golongan, yaitu: (1) sumber alam yang dapat pulih, dan (2) sumber alam tak-dapat-pulih. Sumber-sumber alam tak-dapat-pulih seperti mineral, minyak bumi, gas bumi, dan lain-lain seringkali merupakan sumber daya yang sangat penting bagi negara berkembang, sedangkan sumber alam dapat-pulih seringkali menjadi tulang punggung pembangunan negara berkembang.¹⁶⁾

Sumber daya alam dapat dikategorikan menjadi:

“(a) sumber daya hayati, yakni (i) flora, dan (ii) fauna; (b) sumber daya nonhayati yang lazimnya meliputi (i) tanah; (ii) air; (iii) mineral (termasuk bahan bakar mineral seperti batubara, minyak bumi, gas alam, energi atom); (iv) iklim; (v) energi matahari. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (*non-renewable*, seperti misalnya biji metalik, batubara, minyak bumi, batu-batuan) juga disebut *fund resources* atau *stock resources*. Adapun sumber daya alam

¹³⁾ Moh. Soerjani, Rofiq Ahmad, dan Rozy Munir (ed), *Lingkungan: Sumber Daya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan*, UI Press, Jakarta, 1987, hlm 18.

¹⁴⁾ J.A. Katili, *Sumber Daya Alam untuk Pembangunan Nasional*, Ghalia, Jakarta, 1983, hlm. 15.

¹⁵⁾ Moh. Soerjani, Rofiq Ahmad, dan Rozy Munir (ed), *Op.Cit.*

¹⁶⁾ *Ibid.* hlm. 29.

yang dapat diperbaharui (*renewable*) juga disebut *flow resources*”¹⁷⁾

Permasalahan pokok yang sering timbul berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam adalah berkaitan dengan bagaimana mengelola sumber daya alam dengan bijaksana agar tertopang proses pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kualitas hidup rakyat generasi demi generasi sepanjang masa, oleh sebab itu, perlu diperhatikan tiga hal berkaitan dengan permasalahan tersebut di atas, pertama, pengelolaan sumber dalam alam secara bijaksana, kedua, pembangunan berekesinambungan sepanjang masa, dan ketiga, peningkatan kualitas hidup generasi demi generasi.¹⁸⁾

Pengelolaan sumber daya yang tidak bisa diperbaharui perlu memperhatikan:¹⁹⁾

- a. Segi keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya alam;
- b. Lokasi sumber daya alam serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan masyarakat dan pembangunan daerah;
- c. Penggunaan hasil sumber alam agar tidak boros;
- d. Dampak negatif berupa pengelolaan limbah dipecahkan dengan bijaksana termasuk kemana membuangnya.

Pengelolaan sumber daya alam yang bisa diperbaharui perlu memperhatikan:²⁰⁾

¹⁷⁾ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan: Buku I: Umum*, Binacipta, Bandung, 1981, hlm. 74.

¹⁸⁾ Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, LP3ES, Jakarta, 1991, hlm. 169.

¹⁹⁾ *Ibid.* hlm. 170.

²⁰⁾ *Ibid.*

- a. Cara pengelolaan yang secara serentak disertai dengan proses pembaharuannya;
- b. Hasil penggunaannya untuk sebagian menjamin pembaharuan sumber daya alam;
- c. Teknologi yang dipakai tidak sampai merusak kemampuan sumber daya alam untuk diperbaharui;
- d. Dampak negatif pengolahannya ikut dikelola.

2. Peranan Sumber Daya Alam bagi Pembangunan Nasional

Kekayaan alam dan keanekaragaman hayati yang terdapat di darat, laut, udara dan dirgantara, dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, merupakan salah satu modal dasar pembangunan nasional yang merupakan sumber kekuatan nasional, baik yang efektif maupun potensial, yang dimiliki dan didayagunakan bagsa Indonesia dalam pembangunan nasional.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Pancjang nasional Tahun 2005-2025, mennyatakan : bahwa Visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 adalah mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Pemanfaatan sumber daya alam bukan hanya ada pada pemanfaatan ruang daratan, tetapi juga ditransformasikan kepada pemanfaatan ruang kelautan secara rasional, efisien, dan berwawasan lingkungan, mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan yang becirri nusantara.

Visi pembangunan nasional tersebut, menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, ditempuh melalui 8 (delapan) misi pembangunan nasional, di antaranya, adalah mewujudkan Indonesia asri dan lestari. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari, menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, adalah memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.

Sebagai ukuran tercapainya Indonesia yang maju, mandiri, dan adil, pembangunan nasional dalam 20 tahun mendatang, menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, diarahkan pada pencapaian

sasaran-sasaran pokok, di antaranya, terwujudnya Indonesia yang asri dan lestari ditandai oleh hal-hal berikut:

- a. Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari;
- b. Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan nasional;
- c. Meningkatkan kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.

Sejalan dengan visi dan misi, menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, di antaranya diarahkan untuk mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari dengan penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan di seluruh sektor dan wilayah menjadi prasyarat utama dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan.

Kekayaan alam dan keanekaragaman hayati tersebut terbatas jumlahnya, sehingga pendayagunaannya harus dilakukan secara bertanggung jawab untuk kemakmuran rakyat, oleh karena itu, dalam pemanfaatannya harus memperhatikan faktor-faktor dominan seperti

faktor-faktor demografi, sosial budaya, geografi, geologi, topografi, klimatologi, flora dan fauna, yang merupakan faktor lingkungan hidup.

Pengertian mengenai jenis, kondisi dan nilai setiap sumber alam sangat penting untuk dipahami, karena setiap jenis sumber alam mempunyai karakteristik yang khusus terutama dalam hubungannya dengan ekosistem dan pembangunan.

“Pada dasarnya sumber daya alam tak dapat pulih perlu dipergunakan dan dikelola sehemat dan seefektif mungkin untuk meningkatkan perkembangan ekonomi dalam ukuran waktu yang relatif pendek, sedangkan sumber alam dapat-pulih perlu dipergunakan dan dikelola sehemat dan seefektif mungkin untuk meningkatkan dan mempertahankan perkembangan ekonomi yang baik secara lestari.”²¹⁾

Suatu sumber daya alam dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan, sehingga pemilihan peruntukannya menjadi sangat penting.

“Dalam hal ini, perlu diperhatikan agar pemilihan peruntukan tersebut dilaksanakan atas dasar (1) efisiensi dan efektivitas penggunaan yang optimal dalam batas-batas kelestarian yang mungkin, (2) tidak mengurangi kemampuan dan kelestarian sumber alam yang berkaitan dalam suatu ekosistem, dan, (3) memberikan kemungkinan untuk mempunyai pilihan penggunaan di masa depan, sehingga perombakan ekosistem tidak dilakukan secara drastis.”²²⁾

Permanfaatan sumber alam perlu kita perhatikan empat lingkungan yang saling berkaitan erat sekali, yaitu lingkungan perlindungan yang matang, lingkungan produksi yang bertumbuh, lingkungan serba guna, dan lingkungan pemukiman dan industri. Dalam konsep ini lingkungan produksi tidak dapat terdiri sendiri tanpa menghiraukan lingkungan

²¹⁾ Moh. Soerjani, Rofiq Ahmad, dan Rozy Munir (ed), *Lingkungan : Sumberdaya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan*, UI Press, Jakarta, 1987, hlm. 30.

²²⁾ *Ibid*, hlm. 31.

perlindungan dan lingkungan pemukiman dan industri, begitu sebaliknya dan demikian seterusnya.

“Hal ini berarti alokasi penggunaan sumber alam dan perimbangan penggunaan antara berbagai sumber alam dan lingkungan perlu dilaksanakan dengan hati-hati dan menyeluruh. Unsur pembangunan terpadu sangat menonjol dalam hal ini.”²³⁾

3. Prinsip Hukum Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam

Hubungannya dengan motif ekonomi, secara konstitusional dikatakan, bahwa cabang-cabang produksi yang penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Hal ini tentunya sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, amandemen keempat, menyatakan : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.”

Kekayaan alam dan keanekaragaman hayati yang terdapat di darat, laut, udara dan dirgantara, dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, merupakan salah satu modal dasar pembangunan nasional yang merupakan sumber kekuatan nasional, baik yang efektif maupun potensial, yang dimiliki dan didayagunakan bangsa Indonesia dalam pembangunan nasional. Hal itu berupa: a. kedudukan geografis dengan segala kondisinya; b. sumber-sumber kekayaan alam; c. penduduk;

²³⁾ *Ibid*, hlm. 31-32.

d. rohaniah dan mental; e. budaya; f. potensi efektif bangsa; dan lain-lain. Faktor-faktor dominan yang menggerakkan pembangunan nasional itu sendiri adalah: faktor demografi dan sosial budaya; faktor geografi, hidrografi, geologi dan topografi; faktor klimatologi, faktor flora dan fauna; serta faktor kemungkinan pengembangan.

“Hak negara menguasai atau hak penguasaan oleh negara merupakan konsep yang didasarkan pada organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat. Hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau penguasaan sumber daya alam, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”²⁴⁾

Sesuai fungsinya sebagai Undang-Undang, ketentuan tersebut di atas ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dimana pengertian penguasaan tidaklah sama dengan pemilikan, tetapi lebih bersifat kepentingan publik (*public interest*).

“Diletakkannya asas penguasaan negara, sesungguhnya tidak dimaksudkan untuk memberlakukan sistem etatisme, monopoli, atau semacamnya. Perlu diulangi di sini untuk lebih menyadari, bahwa selain telah ditentukan undang-undang tentang penggunaannya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, juga tersimpul adanya kewibawaan sebuah negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi yang mengatur dan bertanggung jawab atas kehidupan serta kesejahteraan rakyatnya”²⁵⁾

Penguasaan negara atas semua cabang-cabang produksi, sumber daya alam, aset-aset lingkungan, atau cabang-cabang ekonomi yang dianggap vital atau strategis, tidaklah selalu identik dengan pemilikan. Kekuasaan demikian adalah dalam rangka pelayanan publik (*public service*), karena

²⁴⁾ Salim H.S, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2005, hlm. 48.

²⁵⁾ NHT. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, 2004. hlm. 231.

aset-aset lingkungan hidup hakikatnya bersifat kepentingan publik (*public effect or public interest*).

“Sebagai objek kepentingan yang bersifat pelayanan publik atau kepentingan publik (*public service or public effect*) tentunya hal demikian merupakan bagian dari tugas pokok negara. Negara sebagai perwujudan masyarakat hukum terbesar dan merupakan suatu kesatuan badan hukum publik. Negara dapat dan berhak untuk menentukan hukumnya sendiri, meskipun juga harus terikat kepada hukum yang telah dibuatnya sendiri.”²⁶⁾

Adolf Merkel mengatakan “*Die Eigentliche Heimat des Rechts ist (aber) der staats*”, menyatakan :

“Bahwa sumber hukum sesungguhnya adalah negara. Negaralah yang mempunya tugas untuk menetapkan dan mempertahankan hukum. Segala kepentingan umum merupakan unsur yang terpenting dan karenanya perlu diatur, dilindungi dan dijamin oleh hukum.”²⁷⁾

C. Perihal Lingkungan Hidup

1. Asas-asas Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

“Lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”

Sementara itu dalam Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup menyatakan :

²⁶⁾ *Ibid*, hlm. 232.

²⁷⁾ *Ibid*, hlm. 233.

“bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.”

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, secara eksplisit merumuskan asas pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa penyelenggaraan lingkungan hidup diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab negara;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemaran membayar;
- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. otonomi daerah.

Asas tanggung jawab negara merupakan perwujudan dari prinsip negara sebagai organisasi yang berkewajiban melindungi warga negara atau penduduknya, atas teritorialnya, dan semua kekayaan alam serta harta benda dari negara dan penduduknya. Asas ini relevan dengan pendapat para pakar politik negara, Adolf Merker, menyatakan bahwa :

“ Segala yang berbau kepentingan umum harus dilindungi dan dijamin secara hukum oleh negara. Dengan demikian, melalui asas ini di satu sisi negara menjamin bahwa pemanfaatan sumber alam memberikan manfaat optimal kepada publik diikuti kualitas kehidupan yang baik (*life quality*), sementara di sisi lain negara berkuasa untuk melakukan tindakan-tindakan preventif dan represif terhadap aktivitas yang merugikan lingkungan, individu serta masyarakat atau penduduknya.”²⁸⁾

Prinsip 21 Deklarasi Stockholm, menyatakan:

“State have, in accordance with the Chapter of the United Nations and the principles of internasional law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of the other State or of areas beyond the limits of national jurisdiction.”

(Negara memiliki, sesuai dengan Piagam PBB dan prinsip-prinsip hukum internasional, hak-hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber dayanya mengikuti kebijakan-kebijakan lingkungannya, dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa kegiatan-kegiatan atau pengawasan dalam yurisdiksi mereka tidak menyebabkan kerusakan lingkungan negara lain atau area di luar batas yurisdiksi nasional.)

Prinsip 21 Deklarasi Stockholm terdapat dua hal mendasar yang terkandung di dalamnya, yaitu pertama perkembangan hukum berkaitan dengan hak berdaulat (*sovereign right*) terhadap sumber daya alam yang menimbulkan masalah hukum yang bersifat lintas batas (hukum internasional), ke dua keterkaitan eksploitasi sumber daya (sebagai bagian

²⁸⁾ *Ibid*, hlm. 156.

dari kegiatan pembangunan) dengan kebijakan pengelolaan lingkungan sebagai tanggung jawab negara (*state responsibility*)

Penjelasan Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab negara” adalah:

- a. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- b. Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- c. Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Asas keberlanjutan (*sustainable principle*) dalam Penjelasan Pasal 2 Huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mengandung makna bahwa setiap orang memikul kewajibannya dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi. Asas ini merupakan adopsi dari prinsip ekologi pembangunan berkelanjutan (*enviromtmental sustainable development*) dalam Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio de Janeiro tahun 1992. Prinsip 3 Deklarasi Rio, menyatakan : “*The right to development must be fulfilled so as to equitably meet development and environmental needs of present and future generation.*”

(Hak untuk melakukan pembangunan dilakukan dengan memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya).

Asas keserasian dan keseimbangan menurut Penjelasan Pasal 2 huruf (c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Dalam Pasal 1 butir (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa : pembangunan berkelanjutan sebagai upaya sadar dan terencana, yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dengan adanya kewajiban dan tanggung jawab tersebut maka kemampuan lingkungan hidup harus dilestarikan. Lestarnya kemampuan lingkungan hidup menjadi tumpuan terlanjutkannya pembangunan.

Asas kehati-hatian dalam Pasal 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengandung makna bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha

dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 2 huruf j Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat “asas pencemar membayar”, dalam penjelasannya disebutkan bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Pasal 2 huruf k Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan adanya asas partisipatif, yang dalam Penjelasan Pasal 2 huruf k Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan serta aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

Asas berkelanjutan (*sustainable principle*) diadopsi dari prinsip ekologi pembangunan berkelanjutan (*environmental sustainable development*) yang dihasilkan oleh Konferensi Tingkat Tinggi Bumi Tahun 1992 di Rio. Komisi dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan (*World Commision on Environment and Development*) memperkenalkan suatu

konsep pembangunan berkesinambungan, dikatakan bahwa umat manusia memiliki kemampuan untuk menjalankan pembangunan ini berkesinambungan (*sustainable*), untuk memastikan bahwa pembangunan ini dapat mencukupi kebutuhan sekarang tanpa kompromi kemampuan generasi datang untuk menutupi kebutuhan mereka sendiri²⁹⁾

Susan Smith mengartikan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) sebagai meningkatkan mutu hidup generasi kini dengan mencadangkan modal/sumber alam bagi generasi mendatang. Menurut Susan Smith, dengan cara ini dapat dicapai empat hal³⁰⁾

- a. Pemeliharaan hasil-hasil yang dicapai secara berkelanjutan atas sumber daya yang dapat diperbaharui;
- b. Melestarikan dan menggantikan sumber daya alam yang bersifat jenuh (*exhaustible resource*);
- c. Pemeliharaan sistem-sistem pendukung ekologis; dan
- d. Pemeliharaan atas keanekaragaman hayati.

Konsep *ecodevelopment* di Indonesia secara politis mendapat tempat yang jelas dalam GBHN, Ketetapan MPR No. 11/MPR/1993 bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, telah diupayakan secara menyeluruh dan terpadu dengan memperhatikan keseimbangan dan keserasian fungsi lingkungan hidup serta senantiasa memperhatikan “pembangunan yang berkelanjutan” demi kepentingan generasi yang akan datang. Pada bagian lain disebutkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeliharaan daya dukung lingkungan

²⁹⁾Soerjono, *Hukum Lingkungan dan Peranannya dalam Pembangunan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm.1.

³⁰⁾N.H.T. Siahaan, *Op. Cit.* hlm.147-148.

hidup yang telah makin meningkat, yang dapat mendorong pelaksanaan “Pembangunan Berwawasan Lingkungan.” Di samping istilah pembangunan yang berkelanjutan dan pembangunan yang berkelanjutan dan pembangunan yang berwawasan lingkungan, GBHN menyebutkan istilah pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.³¹⁾

Lingkungan hidup sudah sejak lama diatur. Dari catatan pakar hukum lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM), Koesnadi Hardjosmantri, lingkungan hidup masuk dalam bahasan GBHN tahun 1973 (yang dipengaruhi oleh Deklarasi Stockholm 1972) dicantumkan bahwa:

“Penggalian kekayaan alam harus diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup manusia, dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh dan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang.”³²⁾

Pengakuan dunia bahwa, keberhasilan ekonomi dan finansial mereka berkaitan erat dengan kondisi sosial dan lingkungan di mana perusahaan mereka beroperasi. Untuk mewujudkan tanggung jawab semacam itu, dunia usaha diharapkan memperhatikan dengan sungguh-sungguh CSR dalam aktivitas usahanya. Pada intinya, CSR merupakan komitmen dari perusahaan untuk mengintegrasikan kepeduliannya terhadap masalah ekonomi, sosial dan lingkungan atau lebih dikenal dengan istilah “*triple bottom line*”.³³⁾

³¹⁾ Soerjono, *Op. Cit*, hlm. 2.

³²⁾ Mukti Fajar ND, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia: Studi Tentang Penerapan Ketentuan CSR Pada Perusahaan Multinasional, Swasta Nasional & BUMN di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 240.

³³⁾ Isa Wahyudi dan Busyro Azheri, *Corporate Social Responsibility : Prinsip, Pengaturan dan Inflikasi*, Inspire, 2008, hlm. 62.

Apabila aspek segala sesuatu yang berkaitan dengan profit dan people telah menjadi bagian dari suatu aktifitas dunia usaha, belumlah lengkap sebelum perusahaan memasukkan aspek lingkungan (planet) sebagai bagian yang harus diperhatikan dalam aktivitasnya. Namun demikian perlu dipahami juga apa yang dimaksud dengan lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dengan kata lain, lingkungan merupakan segala sesuatu yang terkait dengan seluruh bidang kehidupan manusia, oleh karena itu jika suatu perusahaan ingin eksis dan akseptabel untuk jangka waktu panjang, maka segala aktivitas perusahaan harus menyertakan tanggung jawab pada lingkungan.³⁴⁾

Perlu dipahami juga bahwa hubungan manusia dengan lingkungan adalah hubungan kausalitas, jika merawat lingkungan, maka lingkungan pun akan memberikan manfaatnya. Sebaliknya, jika merusaknya, maka akan ada akibat yang diterima. Asas berkelanjutan yang oleh Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebut dengan istilah “asas kelestarian dan keberlanjutan” mengandung makna bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi masa kini dan generasi masa depan.

Pembangunan seringkali memiliki dampak terhadap lingkungan, sehingga dapat dikatakan bahwa antara pembangunan dan lingkungan

³⁴⁾ *Ibid*, hlm. 138-139.

terdapat suatu pertentangan, oleh karena itu perlu kearifan dan kebijaksanaan manusia dalam mengantisipasi dan mencari pemecahan supaya dapat menciptakan keseimbangan dalam interaksi antara manusia dan lingkungan. Untuk mengantisipasi pertentangan yang terlalu besar antara kedua kepentingan di atas, maka Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup menggariskan bahwa pembangunan berwawasan lingkungan. Dalam Pasal 1 butir (13) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup dikatakan bahwa pembangunan berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengolah sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup.

Pengertian pembangunan berwawasan lingkungan di atas, terdapat tiga unsur penting dalam prinsip pembangunan berwawasan lingkungan, yaitu:

- a. Penggunaan/pengelolaan sumber daya secara bijaksana;
- b. Dalam pembangunan yang berkesinambungan;
- c. Meningkatkan mutu hidup.

Pengertian sumber daya pada pasal tersebut harus diartikan lebih luas yaitu, bukan hanya mencakup pengertian ekonomis seperti sumber daya alam atau sumber daya buatan, tetapi juga meliputi semua bagian lingkungan hidup kita sendiri, mulai sumber daya biotik (manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan), sumber daya abiotik (air, udara, cahaya, tanah,

barang-barang tambang, dan lain-lain), sampai pada sumber daya buatan (mesin, hasil-hasil industri, gedung dan sebagainya).³⁵⁾ Dari ketiga unsur penting dalam pembangunan berwawasan lingkungan di atas, dapat dikatakan bahwa pembangunan berwawasan lingkungan ini merupakan penunjang dalam pembangunan berkelanjutan, sehingga upaya sadar dan berencana dalam menggunakan dan mengolah sumber daya secara bijaksana ini dapat menunjang pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhannya.

Pasal 1 butir (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan : bahwa pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Pelestarian fungsi lingkungan hidup mempunyai peran yang sangat penting dalam melanjutkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup melalui kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan sebagai upaya terpadu dalam pengelolaan lingkungan hidup.

³⁵⁾ N.H.T. Siahaan. *Op.Cit*, hlm. 237.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Berdasarkan hal tersebut, dalam hal pelestarian lingkungan, pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha perlu memperhatikan upaya-upaya sistematis dan terpadu sebagai bentuk keseriusan dan kepedulian akan kelestarian lingkungan sebagai modal penting dalam keberlangsungan kegiatan usahanya dan sebagai upaya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 butir (2) UUPPLH.

Pasal 1 butir (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan : bahwa pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Sementara itu dalam Pasal 1 butir (7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lainnya, dan keseimbangan antarkeduanya. Sementara pengertian daya tampung, pasal 1 butir (8)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan : bahwa daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Tahap perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan: a. inventarisasi lingkungan hidup; b. penetapan wilayah ekoregion; dan c. penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut RPPLH).

RPPLH berdasarkan Pasal 1 butir (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Sementara itu definisi ekoregion berdasarkan Pasal 1 butir (29) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan : wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.

Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan : bahwa pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH, yang mana dalam berikutnya yakni Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan:

- a. Keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
- b. Keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
- c. Keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

Mengenai pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan, Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatur bahwa pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Selanjutnya dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Pencegahan;
- b. Penanggulangan; dan
- c. Pemulihan.

Masalah pelestarian lingkungan juga diatur dan menjadi tanggung jawab bagi setiap penanam modal sebagai mana diatur dalam Pasal 16 huruf (6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yakni setiap penanam modal bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Bahkan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomo 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dinyatakan : bahwa penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbaharukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

D. Perihal Cagar Budaya.

1. Pengertian Cagar Budaya.

Definisi Cagar Budaya berdasarkan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, menyatakan :

“Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.”

Benda Cagar Budaya yang dimaksud pada Pasal 1 butir (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya,

“Benda Cagar Budaya adalah benda alam/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-

sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia”.

Dikatakan Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria :

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan;
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Berdasarkan Pasal 3, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, menyatakan :

“Pelestarian Cagar Budaya itu sendiri bertujuan untuk melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia, meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya, memperkuat kepribadian bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional”.

Diperlukan pelestarian sebagai upaya yang dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Perlindungan dilakukan dengan cara mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran, pengembangan, penelitian, revitalisasi, adaptasi, serta pemanfaatan Cagar Budaya.

2. Asas-asas Pelestarian Cagar Budaya

Sebagaimana yang terkandung dalam Bab II Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Cagar Budaya, terdapat asas-asas pelestarian cagar budaya beserta penjelasannya yaitu sebagai berikut : Asas Pancasila Yaitu pelestarian cagar budaya dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila;

- a. Asas Bhinneka Tunggal Ika Pelestarian cagar budaya senantiasa memperhatikan keberagaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. Asas Kenusantaraan Bahwa setiap upaya pelestarian cagar budaya harus memperhatikan keberagaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- c. Asas Keadilan Pelestarian cagar budaya mencerminkan rasa keadilan dan kesetaraan secara proporsional bagi setiap warga Negara Indonesia;
- d. Asas Ketertiban dan kepastian hukum Bahwa setiap pengelolaan, pelestarian cagar budaya harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum;
- e. Asas Kemanfaatan Pelestarian cagar budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat;

- f. Asas Keberlanjutan Upaya pelestarian cagar budaya yang dilakukan secara terus-menerus dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekologis;
- g. Asas Partisipasi Setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam pelestarian cagar budaya;
- h. Asas Transparansi dan Akuntabilitas Pelestarian cagar budaya dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat secara transparan dan terbuka dengan memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.

3. Pemeliharaan dan Perawatan Cagar Budaya.

Kewajiban dalam pemeliharaan cagar budaya diatur pada Bab VII Pasal 75 Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, menyatakan :

- (1). Setiap orang wajib memelihara cagar budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya;
- (2). Cagar budaya yang ditelantarkan oleh pemilik dan/atau yang menguasainya dikuasai oleh Negara.

Pemeliharaan terhadap cagar budaya tidak hanya dibebankan kepada pemerintah daerah atau pemerintah pusat saja, namun juga bagi setiap orang atau masyarakat yang memiliki atau menguasai cagar budaya wajib melakukan pemeliharaan terhadap cagar budaya. Hal ini dikarenakan kepemilikan cagar budaya yang akhirnya diakui oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Namun demikian, apabila cagar budaya tersebut ditelantarkan atau tidak dipelihara oleh pemilik atau yang menguasainya, maka pemerintah merupakan pihak

yang diutamakan untuk mengambil alih penguasaan atas cagar budaya tersebut.

Kemudian mengenai perawatan cagar budaya diatur dalam Pasal 76 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Perawatan cagar budaya adalah dengan melakukan pembersihan, pengawetan, dan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan, dan/atau teknologi cagar budaya. Cagar budaya yang dikuasai oleh negara, perawatan cagar budaya dilakukan oleh BPCB (Balai Pelestarian Cagar Budaya) yang terdapat di setiap provinsi. Perawatan cagar budaya dilakukan setiap 4 (empat) tahun sekali dengan memperhatikan daftar prioritas yang mengacu pada pemeringkatan cagar budaya.

4. Perlindungan Hukum Terhadap Cagar Budaya

Kamus besar bahasa Indonesia perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker³⁶⁾. Sementara itu pengertian perlindungan hukum menurut Philpius M. Hadjon perlindungan hukum adalah pengakuan dan jaminan yang diberikan oleh hukum dalam hubungannya dengan hak-hak manusia. Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila harus memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat sesuai norma-norma yang terdapat dalam Pancasila.

³⁶⁾Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata *Perlindungan*.

Perlindungan hukum memiliki dua esensi yaitu pengakuan dan jaminan akan hak-hak asasi. Perlindungan terhadap cagar budaya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Pasal 1 butir (23) yaitu perlindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan, dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya. Perlindungan hukum terhadap cagar budaya memiliki dua bentuk yakni perlindungan secara preventif yaitu berupa tindakan pencegahan, dan perlindungan restoratif yang berupa pemugaran cagar budaya. Cagar budaya juga memiliki hak untuk dilindungi demi kepentingan generasi bangsa yang sekarang maupun yang akan datang. Dengan demikian, arti perlindungan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 adalah mengenai objek fisik cagar budaya, sebagaimana Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor 063/U/1995 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya, perlindungan fisik dilakukan karena adanya ancaman proses alam dan dilakukan melalui kegiatan pemeliharaan (*preservation*), konservasi (*conservation*), dan pemugaran (*restoration*).³⁷⁾

Perlindungan hukum terhadap cagar budaya adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam melestarikan cagar budaya dengan memberikan pengakuan dan jaminan terhadap cagar budaya agar dapat bermanfaat bagi kegiatan ilmiah, keagamaan, maupun pariwisata.

³⁷⁾ *Ibid*,

Sehingga cagar budaya dapat dipertahankan keberadaannya, dikembangkan, dan dimanfaatkan potensinya untuk kesejahteraan rakyat.

E. Perihal Pertambangan

1. Pengertian Pertambangan Pada Umumnya

Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas).

Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, Pasal 1 butir (1), dinyatakan bahwa:

“Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang”

Sebagai suatu usaha, penambangan didefinisikan sebagai bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral. Adapun dalam Undang-Undang No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan lebih khusus lagi, dinyatakan bahwa :

“Pertambangan Rakyat adalah satu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan a, b dan c seperti yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong-royong dengan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri”

Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa

pertambangan merupakan kegiatan disengaja untuk mengeksplorasi sumber daya yang terkandung di alam. Penambangan kapur merupakan kegiatan yang tergolong pada penambangan Galian C yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu-Bara. Undang-Undang tersebut merupakan amandemen dari Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Proses kegiatan penambangan Kapur yang baik harus memperhatikan pula manajemen penambangan. Manajemen penambangan merupakan suatu usaha eksplorasi dan eksploitasi yang terencana, teratur dan terorganisir dengan baik.

Mustofa Nur, mengemukakan bahwa dalam kegiatan penambangan Kapur perlu memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut :

- a. Penentuan jumlah cadangan Kapur dan kualitasnya. Penentuan jumlah cadangan dan kualitas kapur sangat diperlukan untuk menentukan nilai ekonomis dari kapur itu. Jumlah cadangan yang besar dan kualitas yang baik tentunya bernilai ekonomis bila dieksploitasi.
- b. Penentuan tempat yang layak ditambang dan tempat yang tidak layak ditambang. Penambangan kapur yang dilakukan pada tempat yang tidak layak, seperti pada kelokan sungai dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan berupa erosi yang sangat intensif dan longsor pada tebing sungai.
- c. Waktu penambangan. yang paling efektif adalah pada musim kemarau, karena air sungai sedikit, sehingga proses penambangan relatif mudah, dan terhindar dari bahaya banjir.
- d. Prioritas tempat penambangan. Tempat yang mudah dan tidak mengganggu kelestarian menjadi skala prioritas.
- e. Kecepatan penambangan bersifat relatif berdasarkan skala prioritas tempat penambangan. Tempat penambangan prioritas dilakukan relatif lebih cepat dibandingkan prioritas berikutnya. Hal ini untuk mendukung umur penambangan.
- f. Cara penambangan. Cara penambangan yang baik dapat mengurangi terjadinya erosi sungai dan longsor pada tebing sungai. Cara penambangan yang cukup ramah lingkungan

adalah dengan cara tradisional tanpa menggunakan mesin atau alat berat lainnya³⁸⁾

Proses kegiatan penambangan kapur juga memberikan dampak kepada lingkungannya baik berupa dampak negatif maupun dampak positif, oleh sebab itu, dampak negatif yang mungkin timbul akibat kegiatan penambangan pasir harus dapat diantisipasi. Salah satunya yaitu melalui proses perizinan yang benar dan setelah melalui kajian AMDAL.

2. Pengaturan Perizinan Pertambangan

Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Bab VII Izin Usaha Pertambangan (IUP), Pasal 36, dinyatakan bahwa :

- (1) IUP terdiri atas dua tahap:
 - a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
 - b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”

Lebih lanjut dinyatakan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Pasal 37, bahwa yang mengeluarkan IUP di daerah (kabupaten/kota) adalah bupati/walikota. IUP hanya diberikan kepada : badan usaha, koperasi, dan perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 38, Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

³⁸⁾Arief Mustofa Nur, *Solusi Penambangan Pasir*. Diakses 30 Agustus 2016 dari <<http://www.suaramerdeka.com/harian/06/08/ked07.htm>>

3. Pengertian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan di Indonesia. AMDAL ini dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Analisis mengenai dampak lingkungan muncul sebagai jawaban atas keprihatinan tentang dampak negatif dari kegiatan manusia, khususnya pencemaran dan perusakan lingkungan akibat kegiatan industri pada tahun 1960-an. Sejak itu AMDAL telah menjadi alat utama untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan manajemen yang bersih lingkungan dan selalu melekat pada tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

AMDAL pertama kali diperkenalkan pada Tahun 1969 di Amerika Serikat. Menurut UU No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup dan PP No 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Jika Indonesia mempunyai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang harus dibuat jika seseorang ingin mendirikan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan dampak besar dan penting terhadap lingkungan. AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada

lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Dasar hukum AMDAL adalah Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan”. AMDAL sendiri merupakan suatu kajian mengenai dampak positif dan negatif dari suatu rencana kegiatan atau proyek, yang dipakai pemerintah dalam memutuskan apakah suatu kegiatan atau proyek layak atau tidak layak lingkungan. Kajian dampak positif dan negatif tersebut biasanya disusun dengan mempertimbangkan aspek fisik, kimia, biologi, sosial-ekonomi, sosial budaya dan kesehatan masyarakat.

Suatu rencana kegiatan dapat dinyatakan tidak layak lingkungan, jika berdasarkan hasil kajian AMDAL, dampak negatif yang timbulkannya tidak dapat ditanggulangi oleh teknologi yang tersedia. Demikian juga, jika biaya yang diperlukan untuk menanggulangi dampak negatif lebih besar daripada dampak positif yang akan ditimbulkan, maka rencana kegiatan tersebut dinyatakan tidak layak lingkungan. Suatu rencana kegiatan yang diputuskan tidak layak lingkungan tidak dapat dilanjutkan pembangunannya.

Kriteria wajib AMDAL ini hanya diperlukan bagi proyek yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan yang pada umumnya terdapat pada rencana kegiatan berskala besar, kompleks serta berlokasi di daerah yang memiliki lingkungan sensitif. Pada dasarnya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah keseluruhan proses yang meliputi penyusunan berturut-turut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

AMDAL berupa dokumen AMDAL yang terdiri dari 5 (lima) dokumen, yaitu:

- 1) Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KAANDAL)
- 2). Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL)
- 3). Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)
- 4). Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)
- 5). Dokumen Ringkasan Eksekutif

4. Hubungan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dengan Izin Lingkungan

Usaha atau kegiatan tertentu tidak dapat dilakukan tanpa izin dari organ pemerintah yang berwenang. Kenyataan tersebut dapat dimengerti karena berbagai hal sering kali terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemohon izin. Izin menjadi alat hak dan kewajiban pemohon untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan tertentu. Seperti dikatakan pada latar belakang, izin lingkungan merupakan salah satu syarat memperoleh izin usaha atau kegiatan. Izin usaha atau kegiatan yang wajib izin lingkungan tersebut adalah aktivitas atau kegiatan usaha yang wajib Amdal ataupun wajib UKL dan UPL.

Pasal 1 butir (35), menyatakan :

“Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL- UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan”.

Izin lingkungan yang termuat dalam UU-PPLH menggabungkan proses pengurusan keputusan kelayakan lingkungan hidup, izin pembuangan limbah cair, dan izin limbah bahan beracun berbahaya (B3). Pada saat berlakunya UU No. 23 Tahun 1997, keputusan kelayakan lingkungan hidup diurus diawal kegiatan usaha. Bidang pertambangan, misalnya, diurus sebelum pembangunan konstruksi tambang. Setelah konstruksi selesai, pengusaha harus mengurus izin pembuangan limbah. Sekarang ketiga perizinan itu digabungkan, diurus satu kali menjadi izin lingkungan. Syaratnya jelas, yaitu analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) atau upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL). Tanpa ketiga dokumen, izin lingkungan tak akan diberikan.

Izin lingkungan merupakan instrumen hukum administrasi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang. Izin lingkungan berfungsi untuk mengendalikan perbuatan konkrit individu dan dunia usaha agar tidak merusak atau mencemarkan lingkungan. Sebagai bentuk pengaturan langsung, izin lingkungan mempunyai fungsi untuk membina, mengarahkan, dan menertibkan kegiatan individu atau badan hukum agar tidak mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, oleh karena itu, izin lingkungan merupakan instrumen kebijakan lingkungan yang sangat esensial dalam upaya mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Fungsi utama izin lingkungan adalah bersifat preventif, yakni pencegahan pencemaran yang tercermin dari kewajiban-

kewajiban yang dicantumkan sebagai persyaratan izin, sedangkan fungsi lainnya bersifat represif yaitu untuk menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diwujudkan dalam pencabutan izin.

5. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Hak dan kewajiban pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan di atur dalam Pasal 90 sampai Pasal 112. Salah satu hak yang diberikan adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 90, Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, menyatakan bahwa : “Pemegang IUP dan IUPK dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi”

Pasal 94, menyatakan, “Pemegang IUP dan IUPK dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Kewajiban pemegang IUP maupun IUPK di atur dalam Pasal 95 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, menyatakan :

- a. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
- b. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
- c. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara;
- d. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
- e. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan”

6. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan semakin marak terjadi, sehingga memerlukan penanganan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan. Hukum lingkungan dibuat dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dan memberi manfaat kepada masyarakat, artinya

peraturan tersebut dibuat untuk kepentingan masyarakat. Hukum lingkungan menetapkan ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindakan perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari pencemaran, perusakan dan merosotnya kualitas lingkungan mutu serta menjamin kelestariannya agar dapat secara langsung digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Pencemaran dan perusakan lingkungan akan selalu ada korban dalam artian sebagai pihak yang dirugikan itu berupa orang perorangan, masyarakat ataupun negara, maka pihak atau pelaku usaha yang menimbulkan pencemaran dan perusakan wajib untuk memberikan ganti rugi di samping adanya beban untuk memulihkan akibat pencemaran dan perusakan yang telah ditimbulkannya, sebagaimana yang dinyatakan di dalam Pasal 87, Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kewajiban untuk memberikan ganti kerugian adalah merupakan konsekuensi dari prinsip bahwa setiap orang berkewajiban untuk melestarikan kemampuan lingkungan guna menunjang pembangunan yang berkesinambungan, oleh karena itu wajar bilamana mereka yang melanggar itu dibebani ganti kerugian.